
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA TRANSISI KEARAH GLOBALISASI

Fashbir Noor Sidin

Abstract: All regions in Indonesia are facing changes transitionally as an effect of the change of governmental management system from centralistic to de-centralistic followed by switchover in development paradigm. More ever, economic globalization with all its implications need a relevant local development plan and policy and depend to local reinforcement resources, network development and also the economic of regional integration.

Keywords: *autonomy, globalization, emulation, cooperation, economic integration of area*

Pembangunan dan Perencanaan

Pembangunan ialah sebuah proses yang berkelanjutan untuk mewujudkan berbagai kehendak manusia yang diupayakan secara tertib dan teratur. Berdasarkan konsep hierarki kebutuhan manusia maka pembangunan dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Tanpa dorongan bagi pemuasan kehendak maka tiada keinginan untuk berubah dalam kerangka peningkatan taraf kehidupan menuju kemandapan dan kesempurnaan. Ini bermakna bahwa persoalan pembangunan sangat kompleks karena terkait dengan sikap dan perilaku manusia untuk mewujudkan kehendaknya. Perencanaan ialah sebuah proses yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi sumber-sumber supaya tercapai optimalitas dalam pemanfaatan sumberdaya (Fashbir Noor Sidin, 2000a).

Perencanaan pembangunan menyangkut peluang dan pilihan. Perencanaan mengintegrasikan seluruh kekuatan dan mengorganisasikan berbagai peluang untuk memperbesar pilihan-pilihan yang bermakna bahwa perencanaan merupakan 'karya imajinatif-aspiratif'. Perencanaan terkait dengan proses alokasi-distribusi sumberdaya selaras dengan politik pembangunan untuk peng-alihan yang berkeadilan. Perencanaan juga berhubungan proses interaksi yang menyangkut keterkaitan (*linkage*) dan keterikatan (*interdependency*) antar ruang beserta kegiatan ekonomi-sosial. Dengan demikian, perencanaan memerlukan suatu pemahaman tentang hakikat sebuah kehendak yang dihubungkan dengan ketersediaan sumberdaya. Perencanaan bersifat 'realistik-obyektif' karena berhubungan dengan upaya penyelarasan antara

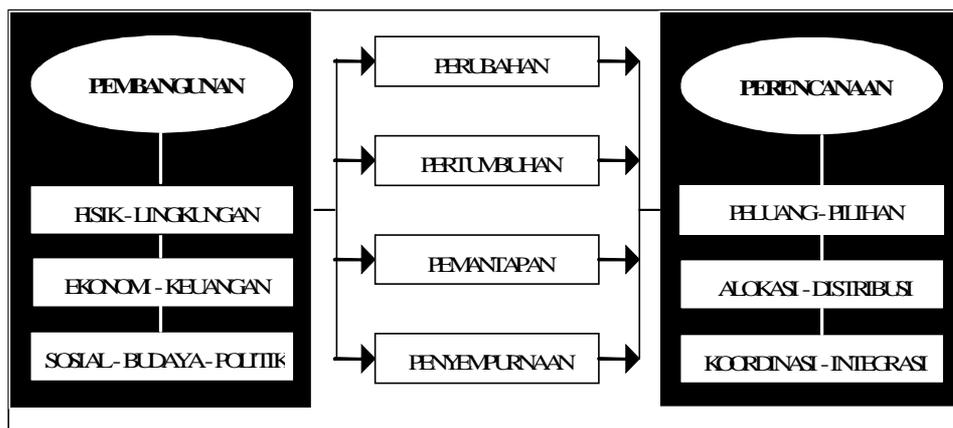
*) Fakultas Ekonomi Universitas
Andalas, Padang.

kehendak dan kemampuan. Apabila perencanaan pembangunan ekonomi dihubungkan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maka strategi-kebijakan pembangunan harus dihubungkan dengan proses transformasi sosial. Wawasan perencanaan (*planning vision*) berdasarkan 'keseimbangan dan keberlanjutan' sebagai asas dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berdimensi sosial agar terwujud 'pembangunan yang berkeadilan' (Fashbir Noor Sidin, 2000b.)

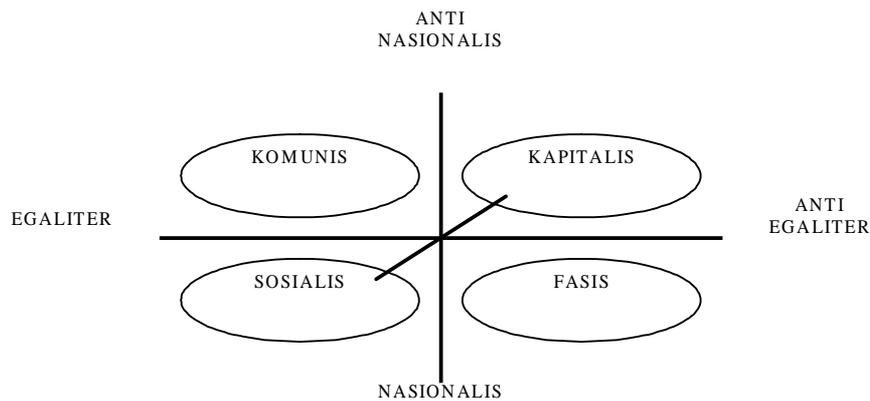
Kesejahteraan terbangun oleh dua kata kunci yaitu 'kemakmuran' dan 'keadilan'. Pembangunan ekonomi menempatkan dimensi keadilan sebagai bagian yang tak terpisahkan. Pembangunan ekonomi yang tidak berdimensi keadilan dapat dikategorikan sebagai anti-pembangunan sebab mengabaikan hak-hak manusia yang

universal. Pembangunan ekonomi di negara berkembang pada umumnya menempatkan dimensi nasionalisme pada satu sisi dan dimensi kerakyatan di sisi lainnya yang mengisyaratkan tentang demokrasi ekonomi sebagai laluan kepada keadilan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan upaya akumulasi kapital dan mobilisasi tabungan. Pembangunan ekonomi dianggap dapat meninggikan harkat dan martabat masyarakat supaya dapat diwujudkan keadilan sosial melalui cara perbesaran peluang-peluang dan pilihan-pilihan serta pengagihannya yang saksama secara bertahap dan bertingkat. Dengan demikian, peran dan kedudukan pemerintah dalam sistem ekonomi sosialis amat penting namun bukan yang terutama untuk mewujudkan keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagan 1. Pembangunan dan Perencanaan



Bagan 2. Sistem Ekonomi Sosialistik dan Kapitalistik



Pembangunan Ekonomi dan Penataan Ruang

Pembangunan ekonomi berkait erat dengan penataan ruang karena menyangkut kebijakan dan strategi dalam pengembangan potensi dan kapasitas untuk keseimbangan pembangunan antar ruang wilayah dan kawasan. Penataan ruang dalam konteks pembangunan ekonomi berkaitan dengan penentuan kawasan andalan dan potensial serta sektor strategis dan prioritas sehingga penataan ruang dan pengembangan kegiatan ekonomi terpadu dalam kebijakan pengembangan wilayah pedesaan dan kawasan perkotaan. Penataan ruang merujuk kepada keserasian, keselarasan dan keseimbangan yaitu menyangkut alokasi-distribusi sumberdaya dalam wilayah dan kawasan yang direncanakan pengembangan potensi dan kapasitasnya. Penataan ruang menyangkut upaya optimalitas fungsi lahan melalui penetapan kawasan andalan dan potensial sehingga dapat ditentukan sektor strategis dan prioritas. Penataan ruang berkaitan dengan visi pembangunan ekonomi tentang

keunggulan (*comparative*) dan daya saing (*competitive*).

Penataan ruang dalam konteks pembangunan ekonomi berkait dengan pengembangan sistem kota-kota yang mengintegrasikan ruang melalui alokasi-distribusi sumberdaya dengan dukungan sistem transportasi dan komunikasi. Sistem kota-kota (*urban system*) memacu perkembangan seluruh kawasan yang terkait dan terikat dengan sistem berdasarkan keunggulan dan daya saing yang relatif berbeda sehingga integrasi ekonomi wilayah dapat diwujudkan berdasarkan potensi dan kapasitas. Sistem kota-kota akan mendorong pengembangan kota-kota secara bertahap dan bertingkat sehingga terbentuk satu kota utama dan beberapa kota kedua dan ketiga. Kota-kota tersebut sangat strategis dalam proses pembangunan wilayah dan kawasan sesuai dengan kecenderungan perkembangannya dari waktu ke waktu. Di Sumatera Barat ada sebuah sistem kota-kota dengan satu kota utama yaitu Padang dan dua kota kedua yaitu Bukittinggi dan Solok serta beberapa kota ketiga yang terkait dan terikat

dengan sistem kota-kota tersebut.

Paradigma Pembangunan Daerah Otonom

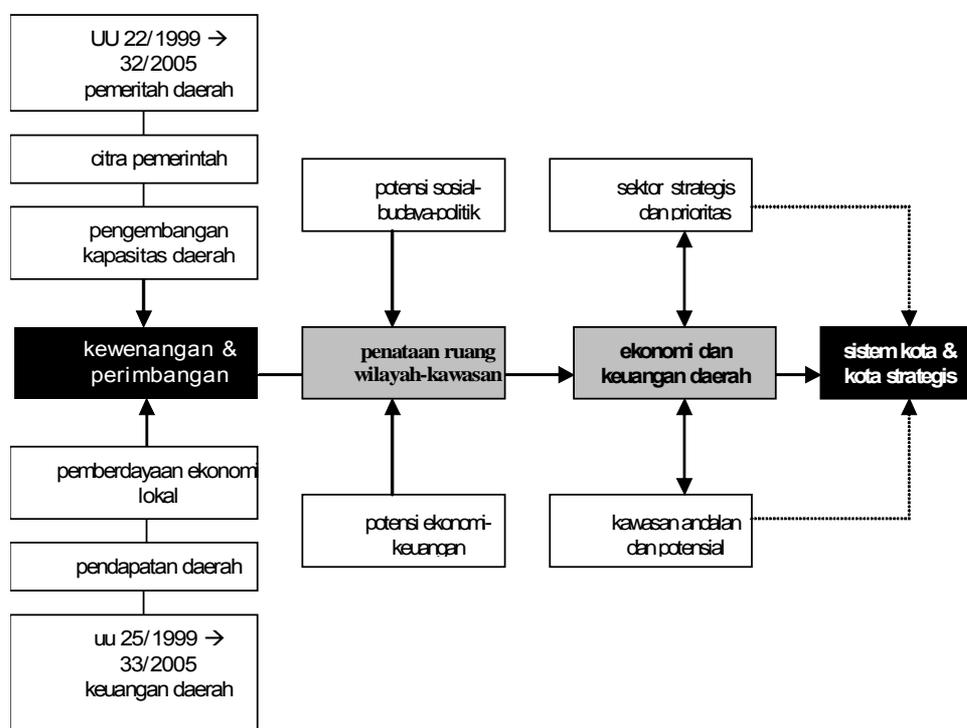
Sistem pemerintahan berubah dari sentralistik kepada desentralistik dan membawa peralihan paradigma yang relevan dengan ketiga dimensi pembangunan dan perencanaan. Peralihan itu selaras dengan perubahan sistem untuk mendukung operasionalisasi sistem tersebut. Kebijakan pembangunan daerah dalam era otonomi yang relevan dengan paradigma tersebut adalah:

- Orientasi manajemen pemerintahan berubah dari berorientasi kepada kepentingan negara menjadi kepentingan rakyat. Ini berarti bahwa

landasan pemikiran pembangunan daerah dari *political base* atau berorientasi kekuasaan kepada *economical base* atau berorientasi pasar. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan dasar beserta mekanisme kontrolnya yang relevan dengan operasionalisasi dari mekanisme pasar.

- Sifat manajemen pemerintahan berubah dari otoriter kepada egaliter dimana demokrasi dan demokratisasi sebagai pijakan dalam proses pengambilan keputusan. Pengurangan bahkan penghapusan konsentrasi kekuasaan pada satu tangan atau meletakkan kembali kedaulatan di tangan rakyat termasuk penguatan demokrasi ekonomi. Pemerintah perlu

Bagan 3. Pembangunan Ekonomi dan Penataan Ruang



merumuskan kebijakan dasar tentang operasionalisasi konsep ‘ekonomi kerakyatan’.

- Sikap manajemen pemerintah yang berpikir dan bertindak secara terkotak-kotak (*boundary*) harus berubah menjadi terintegrasi (*boundaryless*). Kemampuan aparatur perlu ditingkatkan dengan berorientasi kepada mutu dan relevansi, daya tanggap, kerjasama dan usaha, efektif dan efisien yang didukung oleh kebebasan berkreasi berdasarkan konsep *capacity building*. Pengembangan organisasi kaya fungsi diselaraskan dengan pola manajemen partisipatif.
- Pola kerja manajemen pemerintahan berubah dari mendayung (*rowing*) kepada mengarahkan (*steering*). Pemerintah perlu melepaskan sebagian dari fungsi dan peran kepada dunia usaha dan masyarakat dengan menetapkan standar kinerja. Fungsi dan peran pemerintah ditekankan kepada administrasi dan pelayanan. Pembangunan prasarana dan sarana yang strategis diupayakan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.
- Penilaian terhadap manajemen pemerintahan harus berubah dari *low trust* kepada *high trust* melalui perbaikan citra pemerintah. Proses sosialisasi dan persuasi dilakukan dalam rangka perubahan yang mendasar untuk meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan bertujuan untuk mencapai kadar peran serta masyarakat yang optimal. Kepercayaan berkait dengan

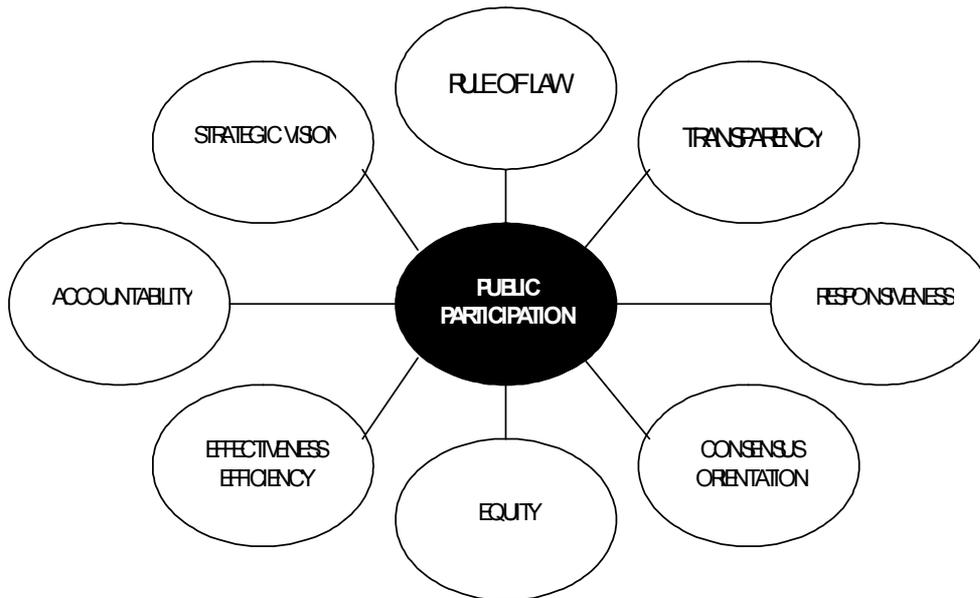
kesadaran dan kerelaan sosial (*social consciousness and awareness*)

Peralihan paradigma terkait erat dengan reformasi internal dalam organisasi pemerintah selaras dengan penegakan supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan. Selain itu, keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat utama disamping stabilitas politik dalam negeri. Oleh sebab itu, perubahan itu harus direncanakan dan dikendalikan berasaskan konsep *change management* (*management of change*). Perubahan dimulai oleh individu dan kelompok terutama pemimpin karena amalan paternalistik dan feodalistik masih sangat kuat. Ini bermakna, perubahan dimulai dari pemerintah dengan mengamalkan secara sadar konsep dasar ‘Good Governance’. ketiga dimensi utama dalam pembangunan dan perencanaan yaitu ekonomi, sosial-politik, lingkungan menjadi landasan kepada perumusan kebijakan pemerintah. Ketiga dimensi tersebut menunjuk kepada peranan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dari segi mikro maupun makro (Kam and Shing, 1997).

Transisi Dalam Era Otonomi Daerah

Otonomi daerah telah dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001. Berbagai perubahan mengikut peralihan paradigma telah dimulai dalam organisasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat walaupun dalam intensitas relatif terbatas dengan kecenderungan ‘wait and see’.

Bagan 4. Prinsip Dasar Good Governance

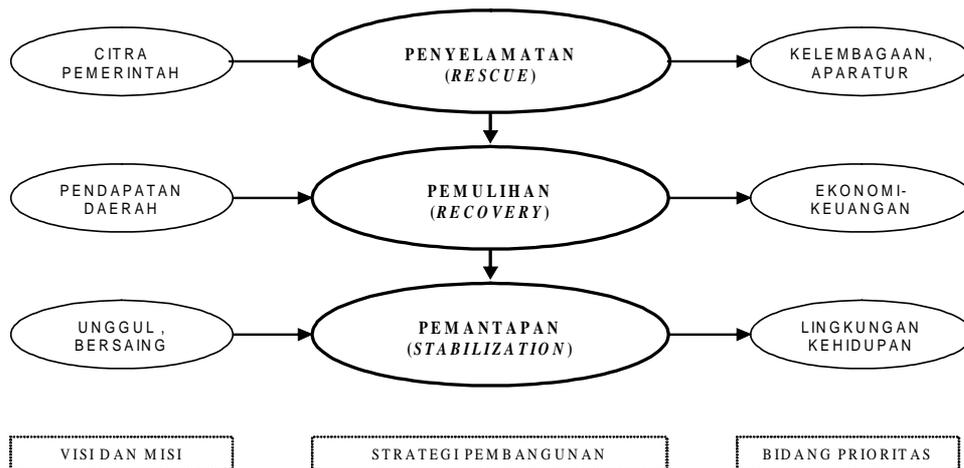


Otonomi telah memasuki masa transisi dimulai dari proses penyelamatan (*rescue*), rehabilitasi (*rehabilitation*), pemulihan (*recovery*), pemantapan (*stabilization*). Masa transisi meliputi periode penyesuaian (*initialization*), pembentukan (*formation*) dan pemasangan (*instalation*) menyangkut kesesuaian dengan pengguna (*users*). Dalam masa transisi tersebut perlu dilakukan penyesuaian antara konsep dan pelaksanaan dengan menemukan metoda yang relevan dengan ruang dan waktu.

Setiap periode saling bergantung satu dan lainnya. Periode penyelamatan (*rescue*) bergantung kepada reformasi internal dalam organisasi pemerintah berupa pengembangan kapasitas serta penegakan supremasi hukum untuk kebenaran dan keadilan. Periode

rehabilitasi bergantung kepada proses transformasi sosial dan pengembangan kapasitas ekonomi dan sosial dengan merehabilitasi prasarana - sarana ekonomi dan sosial sehingga secara bertahap dan bertingkat akan meningkat perekonomian rakyat. Periode pemulihan bergantung kepada interaksi pelaku-pelaku ekonomi dan sosial antar ruang yang berkaitan dengan perbesaran pilihan dan peluang sehingga terbangun basis ekonomi dan sosial yang kuat melalui pengembangan kegiatan yang relevan dengan potensi wilayah dan kawasan. Periode stabilisasi bergantung kepada proses integrasi ekonomi antar regional yang berkait dengan peningkatan pendapatan daerah sehingga mampu melaksanakan keseluruhan kewenangan dan tanggungjawab pembangunan daerah.

Bagan 5 Orientasi Pembangunan Dalam Era Transisi



Transisi Ke Arah Globalisasi Ekonomi

Globalisasi artinya ‘mendunia’. Proses globalisasi berupaya membangun masyarakat ekonomi dunia yang unggul dan bersaing sehingga semua prasyarat yang relevan dengan mekanisme pasar perlu dikembangkan. Proses globalisasi memerlukan sumberdaya dan faktor pendukung yang selaras dengan karakteristik global yaitu sistem ekonomi dan kelembagaan, bahasa dan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem politik (dan pemerintahan) yang demokratis yaitu mentolerir keanekaragaman dengan dukungan sistem hukum yang independen dan transparan adalah suatu upaya untuk mewujudkan masyarakat madani melalui proses institusionalisasi dan penegakan supremasi hukum (Fashbir Noor Sidin, 2001a). Masyarakat madani menjadi idaman sebab madani menggambarkan keberdayaan insan. Masyarakat madani sering disebut sebagai *civil society* yang berlandaskan kebebasan dan demokrasi

sehingga mampu mengoptimalkan dayaguna dan nilai guna sumberdaya. Masyarakat madani berpeluang mencapai kemakmuran yang lebih tinggi dan lebih cepat dimana unsur masyarakat yang belajar (*learning society*) sebagai penggerakannya. Masyarakat madani menjadi umat yang religius sebab rizki disyukuri dengan ikhlas berdasarkan pemahaman tentang makna kehidupan. Masyarakat madani mengamalkan ajaran agama berdasarkan ilmu dan iman untuk membina akhlak mulia. Masyarakat madani suka membaca dan menulis dan mau serta mampu mengkomunikasikan pemikirannya. Profil masyarakat madani amat relevan dengan bangsa Indonesia yang sosialis-religius. Karakteristik madani itu sesuai dengan prasyarat untuk memasuki proses globalisasi (Fashbir Noor Sidin, 2001b).

Manusia yang unggul dibangun melalui pengembangan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia. Indonesia telah